

**RENJA
KAPANEWON KASIHAN 2023**

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Kasihan menyusun Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan. Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

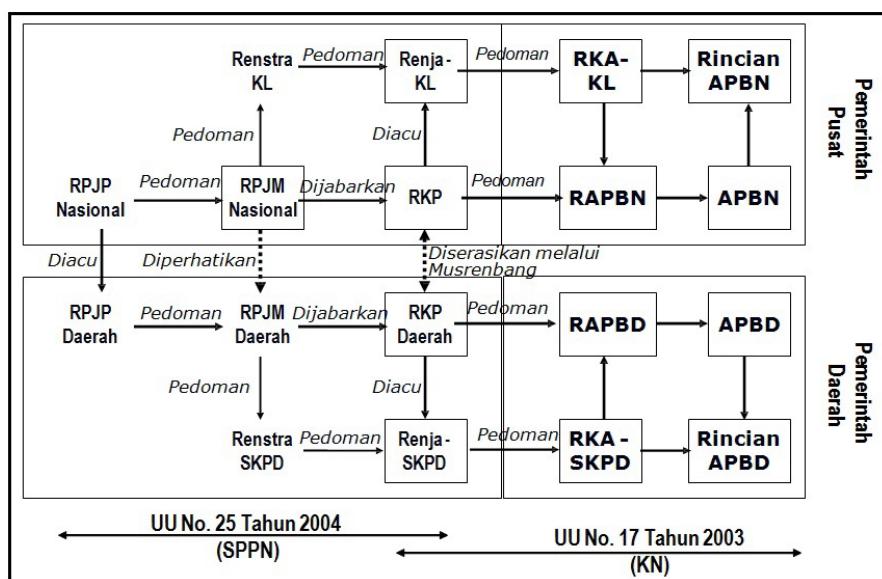
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Kasihan disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Kasihan dalam penyusunan RKA Kapanewon Kasihan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Kasihan adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Kasihan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Kapanewon Kasihan

Yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021		
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	
7.01						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	80	angka	80	angka
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	85	Persen	85	Persen
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	3	Dokumen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	7	Dokumen	7	Dokumen
		Dokumen Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen
		Dokumen Keuangan dan Aset	30	Dokumen	30	Dokumen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	100	Angka	100	Angka
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	14	kali	14	kali
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penerima tunjangan kinerja	18	Orang/Bulan	18	Orang/Bulan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	85	angka	85	angka
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	10	jenis	10	jenis

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	(6) = (5)/(4)	
1	2	3	4	5			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	7	jenis	7	jenis	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan alat kebersihan	15	jenis	15	jenis	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	48	Jenis	48	Jenis	100
		Penggandaan	60,160	lembar	60,160	lembar	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undangan	4	jenis	4	jenis	100
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	40	Dokumen	40	Dokumen	100
		perjalanan dinas dalam daerah	360	OP	360	OP	100
		perjalanan dinas luar daerah	-	Perjalanan	-	Perjalanan	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	100	angka	100	angka	100
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	2,000	lembar	2,000	lembar	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon dan Listrik	12	bulan	12	bulan	100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	9	jenis	9	jenis	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor pengelola keuangan BMD	120	Dokumen	120	Dokumen	100
		Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	2	Dokumen	2	Dokumen	100
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	1	Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan kegiatan Pelayanan Masyarakat	2	Dokumen	2	Dokumen	100
		Laporan pengelolaan administrasi umum	2	Dokumen	2	Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JasanPemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2	6	unit	6
		JasanPemeliharaan kendaraan Dinas Roda 4	1	unit	1
		Belanja Bahan Bakar Minyak	500	liter	500
		Pajak Kendaran Bermotor	7	unit	7
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	2	Unit	2
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	90	angka	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	100	persen	100
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen monografi Kecamatan	2	dokumen	2
		Laporan operasional vaksin	1	dokumen	1
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	4	dokumen	
		Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa	12	dokumen	12
		Laporan rakorpimcam	3	dokumen	3
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	100	Perse	100
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey kepuasan masyarakat	2	dokumen	21

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3 jenis layanan yang diberikan masyarakat yang dilayani	4	5	(6) = (5)/(4)	
			21	jenis		100
			13,000	Orang	13,000	Orang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	100	persen	100	persen
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	100	persen	100	persen
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Pelaksanaan Musrenbanng	2	dokumen	2	dokumen
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang Dikpora	3	dokumen	3	dokumen
		Laporan pendampingan pengentasan kemiskinan	3	dokumen	3	dokumen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	persen	100	persen
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	persen	100	persen
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monitoring lokasi rawan bencana	4	Dokumen	4	Dokumen
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	4	Dokumen	4	Dokumen
		Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas	4	dokumen	4	dokumen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	persen	100	persen
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	persen	100	persen
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	5	Dokumen	5	Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3 laporan Rakor Muspika	4	5	(6) = (5)/(4) 100
			3	Dokumen	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	N I H I L	-

Commented [AAW1]: Yang dinilai adalah kinerja target bukan kinerja keuangan. Diketahui beberapa program memiliki kinerja di bawah 100%. Mohon cek kembali tabel 2.1.

Commented [A2R1]: sudah

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Kasihan tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Commented [AAW3]: Disesuaikan dengan revisi tabel 2.2

Commented [A4R3]: sudah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kegiatan tepat waktu Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan; Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi; Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	barang yang diperlukan mudah diperoleh; Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh; Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman; Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	barang yang diperlukan mudah diperoleh; Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. Pihak ketiga mudah ditemukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. Pihak ketiga mudah ditemukan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	barang yang diperlukan mudah diperoleh; Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor , disusun berdasarkan kebutuhan; Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya anggaran, dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Koordinasi Penyeleggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya SOP Pelayanan; Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan dan pelaksanaan terencananya pelaksanaan kegiatan;; Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan; Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Tersusunnya usulan pembangunan desa;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang; Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan. Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan; Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan; Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;

2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Kasihan merupakan Perangkat Daerah yang bernama Kapanewon Kasihan

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021**)		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
1	IKM Kapanewon	83	80	85	90	90	90	90	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	70	85	90	-	-	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70	80	85	88	90	90	90	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	70	80	85	90	100	100	100	Realisasi prioritas usulan Musrenbang Kapanewon diampu oleh OPD, refocusing anggaran dan perubahan prioritas OPD mempengaruhi persentase realisasi

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewewon Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Kasihan yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. IKM Kapanewon
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
 2. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan
 3. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan
 4. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.
 - b. Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
 2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
 3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pengendalian;
 4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
 5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.
 - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
 2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
 3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pendampingan dan pengawasan penyusunan APBDes;
 4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;

5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyusun APBDes berdasarkan RPJMDes.
- d. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon.
- IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
 2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
 3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pendampingan dan pengawasan penyusunan Musrenbang;
 4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
 5. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah KapanewonKasihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kecamatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Kasihan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

No	Kekuatan	Kelemahan
1	SDM yang beragam	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon
2	Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
3	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah
4	Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

No	Peluang	Tantangan/Ancaman
1	Usulan penambahan dan diklat PNS	<ul style="list-style-type: none"> Penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta evaluasi jabatan
2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Usulan penambahan anggaran, asset dan penghapusan; ✓ Adanya unit OPD di kewilayahan Kapanewon; ✓ Adanya Dana Desa/Kelurahan; ✓ Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR);Program pembangunan dari dana aspirasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pagu anggaran yang telah ditentukan dan belanja aset yang terbatas; Terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat; Fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak optimal; Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal.
3	Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan , maupun pengelolaan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima
4	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	Aspirasi dan Komunikasi tingkat kelurahan yang tidak dapat terakomodir dan terpenuhi dengan baik
5	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
6	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang Pengembangan potensi Wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan
7	Potensi produk-produk unggulan setempat	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk; Potensi tidak berkembang
8	Pembangunan pasar klitikan niten, Taman Kuliner, kedung pengilon	<ul style="list-style-type: none"> Gesekan kepentingan antar masyarakat; Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Kasihan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana asset daerah dalam mendukung pelaksaaan tugas pokok dan fungsi kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahannya baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon;
5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata alam serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat kelurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kasihan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Commented [AAW5]: Sesuaikan rancangan awal rkpd dengan sub kegiatan pada perup renstra eksisting dan hasil analisis kebutuhan dengan draft Perubahan Renstra (menggunakan indikator sesuai kepmen dan program rutin sesuai template).

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kap. Kasihan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	100 persen	116,040,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kap. Kasihan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	100 persen	116,040,000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	50.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	50.000.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	6 Dokumen	50.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	6 Dokumen	50.000.000	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	82 persen	66,040,000	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	82 persen	66,040,000	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66,040,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66,040,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Menyurat					Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	53,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	53,600,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 jenis	12,750,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 jenis	12,750,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 dokumen	119,175,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 dokumen	119,175,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	95 persen	225,573,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	95 persen	225,573,800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	66,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	66,250,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	26,250,000				10 unit	26,250,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	133,073,800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	133,073,800	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Kasihan	Cakupan Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persen	61,681,150	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Kasihan	Cakupan Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persen	61,681,150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	90 persen	41,120,800	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	90 persen	41,120,800	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 dokumen	20,560,400	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 dokumen	20,560,400	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	20,560,400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	20,560,400	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	90 persen	20,560,350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	90 persen	20,560,350	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	20,560,350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	20,560,350	
IV	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kap. Kasihan	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	90 persen	111,462,477	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kap. Kasihan	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	90 persen	111,462,477	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	90 persen	74,308,327	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	90 persen	74,308,327	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah dokumen Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 dokumen	37,154,177	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lemabaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 dokumen	37,154,177	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 dokumen	37,154,150	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 dokumen	37,154,150	
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	82 persen	37,154,150	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	82 persen	37,154,150	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	37,154,150	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	37,154,150	
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kap. Kasihan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	90 persen	35,679,800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kap. Kasihan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	90 persen	35,679,800	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 persen	35,679,800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 persen	35,679,800	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	35,679,800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	35,679,800	
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kap. Kasihan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	89,301,184	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kap. Kasihan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	89,301,184	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90 persen	89,301,184	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90 persen	89,301,184	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah dokumen Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 dokumen	89,301,184	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah dokumen Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 dokumen	89,301,184	
					3,718,303,821					3,718,303,821	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankhan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Kasihan;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

Commented [AAW6]: Bisa menggunakan kalimat aktifm dengan awalan me-

Commented [A7R6]: sudah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Pemantapan

kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas". Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihanserta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon	IKM	90 angka

Commented [AAW8]: Mohon cek lagi cascading.

Commented [A9R8]: sudah

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Commented [AAW10]: Diisi data SIPD terupdate untuk rancangan akhir.

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana/		
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadmindistrasi rasioan keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	22 Laporan	85 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	10,000,000
7	1	1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										5,000,000	5,000,000	
7	1	1	2.0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5,000,000	
7	1	1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										167,599,00	204,602,00	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Paket	95 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	10,500,000
					Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen					Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana/		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			81 Angka			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka		
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Paket	95 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	22,000,00 0
					Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen					
					Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka					
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Paket	95 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	22,000,00 0
					Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen					
					Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka					

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Paket	95 Persen	14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	14,700,000
7	1	1	2.0 6	6		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum			95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	
7	1	1	2.0 6	6		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	
7	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	2 Dokumen	95 Persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	4,800,000
7	1	1	2.0 6	6		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum			95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	
7	1	1	2.0 6	6		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana/			
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasiha n, Semua Kelura han	81 Angk a	12 Laporan	95 Perse n	6,000,000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angk a	6,000,000
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum			95 Perse n					Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Perse n		
						Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			81 Angk a					Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angk a		
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasiha n, Semua Kelura han	81 Angk a	24 Laporan	95 Perse n	89,399,00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angk a	125,102,0 00
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum			95 Perse n					Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Perse n		
						Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			81 Angk a					Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angk a		

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana/				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	50 Orang	90 Persen	45,328,123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90 Persen	10,328,123
TOTAL										3,173,398 .005			3,230,037 .448				

Sumber : <https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah>

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Panewu Kasihan

SUBARTA.S.SOS,M.SI
NIP. 196708171991031013